

# PRRI-PERMESTA : Sebuah Kasus Keterkaitan antara Masalah Integrasi Nasional dan Perang Dingin \*1

Oleh : Dr. Saafroedin Bahar

✓✓  
Pengantar

Adalah menarik perhatian bahwa walaupun ada pemberontakan yang berlangsung jauh lebih lama, meliputi daerah yang hampir sama luasnya, dan mempunyai latar belakang ideologi yang jauh lebih berbahaya-seperti pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia-namun kelihatannya Presiden Soekarno memandang pemberontakan PRRI-Permesta jauh lebih berbahaya. Oleh karena itulah ia memberikan julukan khusus sebagai *Pancasila Crusade* kepada seluruh operasi militer yang dilancarkan dalam tahun 1958 untuk menumpas pemberontakan tersebut. Istilah tersebut menunjukkan persepsi pribadi Soekarno tentang betapa seriusnya ancaman pemberontakan itu terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara secara menyeluruh, yang menjadi obsesinya sejak muda.

Memang ada yang khas pada pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1958-1961 di Pulau Sumatera dan Sulawesi tersebut. Latar belakang, aksi serta proses penyelesaian pemberontakan yang terjadi pada saat Indonesia mempergunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tersebut, jauh lebih kompleks dari pemberontakan-pemberontakan lainnya. Jika pemberontakan-pemberontakan lainnya hampir sepenuhnya berkenaan dengan masalah-masalah dalam negeri-yang sebagian

---

\*1 Makalah untuk seminar sehari "50 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam perspektif sejarah : Peristiwa PRRI-Permesta" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Wilayah Amerika dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta 21 April 1998. Judul yang dimintakan panitia sedikit direvisi untuk mempertajam fokus perhatian.

besar lokal-PRRI-Permesta selain berkenaan dengan masalah politik nasional dan menyangkut mantan tokoh-tokoh penting angkatan darat dan politisi di tingkat nasional, juga menyangkut para komandan militer daerah. Selain itu, pemberontakan ini mempunyai dimensi internasional dalam Perang Dingin, dengan keterlibatan operasi intelijen pemerintah Amerika Serikat dalam skala besar melalui *Central Intelligence Agency* (CIA). Dalam operasi CIA ini juga terlibat pemerintah beberapa negara tetangga saat itu.

Pada tatanan nasional itu sendiri, latar belakang pemberontakan PRRI-Permesta ini berkaitan dengan akumulasi aneka ragam masalah yang timbul dalam rangka integrasi nasional Republik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan akhir Desember 1949. Pada dasarnya integrasi nasional adalah proses mempersatukan rakyat, pemerintah dan wilayah sebagai komponen konstitutif negara sehingga tercapai efek sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Di antara masalah integrasi nasional yang tampil menonjol saat itu adalah masalah integrasi berbagai kesatuan bersenjata lokal menjadi angkatan darat reguler, termasuk masalah akseptabilitas tokoh kepala staf angkatan darat; campur tangan parlemen terhadap masalah intern angkatan darat tersebut; hubungan antara Presiden Soekarno dengan kabinet parlementer dan dengan kepemimpinan angkatan darat; masalah keretakan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri Wakil Presiden Hatta bulan Desember 1956; masalah ideologis pasca Pemilihan Umum 1955 sehubungan dengan penyusunan konstitusi baru pengganti Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950; masalah konsepsi Soekarno sejak tahun 1957 untuk memasukkan tokoh-tokoh partai Komunis Indonesia ke dalam pemerintahan; terjadinya teror politik terhadap politisi di Ibukota yang menyebabkan mereka merasa perlu melarikan diri ke daerah, dan *last but not least* masalah ketimpangan alokasi sumber daya nasional antara pulau Jawa dan daerah-daerah luar Jawa.

Pada tingkat daerah, tidak dapat diabaikan kondisi khas pasca perang kemerdekaan yang terdapat di luar Jawa, berwujud masih eratnya hubungan solidaritas antara rakyat setempat dengan kesatuan-kesatuan angkatan darat yang terbentuk dan berjuang di daerah tersebut. Solidaritas tersebut semakin erat akibat perasaan dianaktirikan oleh kebijakan pemerintah pusat yang memberi kesan terlalu mementingkan pulau

Jawa. Hubungan solidaritas ini terlihat amat kuat di daerah yang penduduknya secara etnik adalah homogen seperti di daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara dan relatif lemah di daerah-daerah penduduknya heterogen seperti di daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Kompleksitas masalah integrasi nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ini berlangsung pada saat Perang dingin yang bermula pada tahun 1949, yang memandang segala sesuatu dalam konteks rivalitas dua superpower yang timbul setelah *Perang Dunia Kedua*, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

### Studi Komprehensif Terhadap PRRI/Permesta

Walaupun demikian luas dan kompleksnya latar belakang pemberontakan ini, namun sampai terbitnya buku Dr.R.Z.Leirissa dalam tahun 1991<sup>1</sup> dan buku Audrey serta George McTurnan Kahin dalam tahun 1995<sup>2</sup>, sungguh sangat sedikit literatur yang membahas masalah PRRI-Permesta ini secara komprehensif.<sup>3</sup> Publikasi resmi sebelum itu pada umumnya bersifat fragmentaris, menekankan aspek-aspek tertentu saja dari masalah yang kompleks itu<sup>4</sup>. Oleh karena itu secara akademik memang ada kebutuhan untuk memperoleh eksplanasi serta interpretasi yang lebih komprehensif mengenai pemberontakan itu. Dewasa ini ulasan yang lebih komprehensif itu lebih mungkin dilakukan, baik oleh karena sudah terdapat jarak yang cukup jauh dengan peristiwa itu sendiri maupun oleh karena semakin banyak literatur yang dapat dimanfaatkan. Buku Leirissa dan Kahin tersebut di atas dapat dipandang sebagai perin-

- 
1. Leirissa, R.Z., 1991, *PRRI-Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, PT Pustaka Utama Garfidi, Jakarta
  2. Kahin, Audrey dan George Mc. Turnan, 1995, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debeacle in Indonesia*, The Free Press, New York.
  3. Posisi Pemberontakan PRRI dalam konteks integrasi nasional di daerah Sumatera Barat penulis ulas dalam tesis S3 penulis *Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau Di Daerah Sumatera Barat, 1945-1984*, yang penulis pertahankan di depan Senat Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tanggal 26 agustus 1996.
  4. Lihat misalnya Dinas Sejarah TNI-AD, 1978, *Pemberontakan Separatisme di Indonesia*, Bandung.

tis yang perlu diikuti oleh buku-buku lainnya, baik untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat daerah.

Substansi kedua buku tersebut bersifat saling melengkapi. Sesuai dengan subtitel bukunya, Leirissa memandang pemberontakan PRRI-Permesta tersebut sebagai masalah dalam negeri, yaitu sebagai "strategi membangun Indonesia tanpa komunis". Sedangkan suami isteri Kahin membahas masalah itu dari aspek Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur dalam masa kepresidenan Eisenhower, dengan menggunakan demikian banyak dokumen-dokumen resmi yang sudah di-declassified<sup>5</sup>. Selain bermanfaat untuk memahami latar belakang timbulnya pemberontakan PRRI, kedua buku tersebut jelas bermanfaat sebagai model untuk pengembangan kajian masalah integrasi nasional yang lebih komprehensif di Indonesia, yang sekaligus mencakup baik masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri.<sup>6</sup>

Pengembangan visi kesejarahan yang bersifat komprehensif ini merupakan kebutuhan yang urgen, bukan hanya untuk memahami sejarah masa lampau kita dengan tepat, tetapi juga untuk memahami dinamika ketahanan nasional Indonesia, baik untuk menilai kompleksitas kondisi masa kini, untuk memprediksi kecenderungan masa depan, serta untuk merumuskan kebijakan nasional yang diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional itu. Secara perlahan tetapi pasti, bangsa dan negara kita akan merupakan bagian dari tatanan baru dunia, yang terdiri

- 
5. Sekedar sebagai catatan, perundang-undangan Indonesia belum mengandung ketentuan yang pasti mengenai sampai berapa lama kerahasiaan suatu dokumen pemerintah sebelum terbuka untuk digunakan untuk umum. Jika tidak ditentukan lain, lazimnya masa kerahasiaan suatu dokumen adalah sekitar 30 tahun. Dengan demikian, maka dokumen-dokumen sebelum tahun 1968 seyogyanyasudah dapat dibuka untuk pengkajian ilmiah.
  6. Dalam menganalisis integrasi nasional ini, yaitu proses menyatukan seluruh komponen suatu negara nasional sehingga tercapai efek sinergi yang sebesar-besarnya dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, besar manfaatnya jika kita memanfaatkan sebagai referensi pengetahuan baku dari negara sebagai suatu subjek hukum internasional, seperti yang disepakati dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Menurut konvensi ini suatu negara harus mempunyai empat kualifikasi, yaitu adanya penduduk atau rakyat yang permanen, wilayah yang jelas batas-batasnya, sebuah pemerintahan, dan kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan internasional. Dari empat kualifikasi ini, tiga kualifikasi merupakan unsur konstitutif negara, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Lihat John W. Wheeler Bennett (ed), 1934, *Documents on International Law*, Royal Institute Of International Affairs, London, h 482-484. Juga D. Didik Saputra, 1991, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, h 9.

dari negara-negara yang saling tergantung satu sama lain. Visi serta persepsi yang bersifat fragmentaris bukan saja kurang lengkap tetapi juga mungkin kurang benar.

Suatu tantangan yang kita hadapi dalam memahami seluruh perkembangan sejarah yang bersifat wide-gauged ini adalah paradigma apa yang akan kita gunakan untuk menafsirkan perkembangan yang terjadi<sup>7</sup>. Adalah suatu hal yang meraiik untuk diperhatikan bahwa baik Leirissa maupun Kahin memusatkan perhatiannya pada kebijakan para tokoh puncak dalam struktur pemerintahan negara. Kebijakan, strategi serta keputusan yang mereka ambil, yang berlangsung dalam tatanan kenegaraan yang mempunyai otoritas legal untuk itu, baik tepat maupun tidak, baik disetujui maupun ditentang oleh rakyatnya sendiri, secara de facto sangat mempengaruhi perkembangan sejarah. Pembahasan masalah PRRI-Permesta memang akan terfokus pada peranan tokoh-tokoh sentral seperti Presiden Soekarno, Perdana Menteri Djuanda, Kolonel Zulkifli Lubis dan Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Indonesia dan Presiden Eisenhower, Menteri Luar Negeri John Foster Dulles serta kepala CIA W. Allen Dulles dari Amerika Serikat. Sulit membayangkan terjadinya peristiwa PRRI-Permesta ini sekiranya yang berada pada posisi yang mereka duduki saat itu adalah tokoh-tokoh lain dengan visi, kebijakan atau strategi yang berbeda.

Dengan lain perkataan, paradigma peranan Orang Besar dalam sejarah yang antara lain dianut oleh Thomas Carlyle, memang banyak manfaatnya dalam menerangkan sejarah, walaupun bersama dengan Robert Michels di dalam hati kita menganut cita-cita mulia tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat.<sup>8</sup> Kelihatannya, paradigma Orang Besar ini terutama bermanfaat untuk menganalisa sistem pemerintahan yang secara de iure atau secara de facto memberikan tugas dan kewenangan besar kepada tokoh-tokoh tertentu, misalnya kepada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial atau kepada penguasa perang pusat pada saat suatu negara berada dalam keadaan bahaya.

---

7. Tentang fungsi paradigma dalam menafsirkan fakta lihat Thomas S. Khun, second edition, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago.

8. Michels, Roberts, Terj. Mien Joebhaar, 1984, *Partai Politik dan Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*, CV Rajawali, Jakarta.

Baik dinamika integrasi nasional maupun hubungan internasional akan memperoleh dimensi yang lebih manusiawi dan realistis jika ditelaah dari segi kepribadian dan hubungan interpersonal para tokoh sentral ini. Tidak jarang terjadi bahwa hal-hal yang "kecil" dan bersifat non instiusional seperti kesukaan atau ketidaksukaan seorang tokoh secara pribadi terhadap tokoh lainnya ikut memegang peranan dalam kebijakan, strategi serta keputusan yang diambilnya. Hal itu terlihat dengan jelas dalam kasus pemberontakan PRRI-Permesta dan masalah intervensi pemerintah Amerika Serikat di dalamnya.

Sudah barang tentu para tokoh sentral tersebut tidak bekerja sendirian. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mereka dibantu oleh sebuah korps subelite, yang memberikan pelayanan secara profesional atau secara politis. Juga sudah barang tentu bahwa tidak semua orang akan menerima kebijakan, strategi atau keputusan yang diambil oleh para tokoh sentral tersebut. Cepat atau lambat akan tumbuh sekumpulan tokoh kontraelite, yang menyanggah para tokoh tersebut baik dalam bentuk yang lunak maupun dalam wujud yang lebih keras. Kelihatannya sejarah banyak dipengaruhi oleh interaksi para tokoh sentral ini dengan para subelite dan kontraelite, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah<sup>9</sup>. Peranan rakyat dalam keseluruhan perkembangan peristiwa itu adalah dalam memberikan atau menolak memberikan legitimasi kepada elite yang bersangkutan.

## Latar Belakang, Setting dan Tokoh-tokoh

### 1. Tingkat Nasional

Sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer menurut Undang-undang dasar 1950 yang berlaku saat itu, baik pada tahap prolog maupun pada saat terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta awal tahun 1958,

<sup>9</sup>. Menurut Dawam Rahardjo, teori elite ini berasal dari kebutuhan untuk mempersatukan Italia dalam abad ke-19. Teori ini kemudian dikembangkan dari negeri-negeri lain. Tokoh-tokoh terkenal dari teori ini antara lain adalah Gaetano Mosca (1815-1941) dan Vifredo Pareto (1848-1923) dari Itali, Robert Michels (1876-1939) dari Swiss dan c. Wright Mills dari Amerika Serikat. Lihat pengantar Dawam Rahardjo, "Dari Pareto ke Gramsehi" dalam Richard Bellamy, Terj. Verdi R. Hadiz, cetakan ke-delapan, 1990, *Teori Sosial Modern, Perspektif Itali*, LP3ES, Jakarta, h ix.

secara formal Presiden Soekarno bukanlah merupakan kepala pemerintahan. Sejak tahun 1950 kekuasaan serta tanggungjawab pemerintahan berada dalam tangan seorang perdana menteri yang mempunyai dukungan suara yang cukup dalam parlemen<sup>10</sup>. Dengan demikian, penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya pemberontakan ini sesungguhnya terletak dalam tangan perdana menteri yang sedang menjabat.

*Constitutional setting* perkembangan keadaan yang merupakan prolog pemberontakan PRRI-Permesta sejak bulan Desember 1956 layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dalam. Secara teoretikal dapat dipersoalkan apakah ultimatum terhadap kabinet parlementer Djuanda oleh panglima daerah yang bergolak pada tanggal 10 Februari 1958, sebagai bagian dari kompleksitas kondisi integrasi nasional yang belum terangani dan *notabene* tetap menghormati Pancasila, negara Republik Indonesia, serta posisi konstitusional Presiden Soekarno berdasar Undang-undang Dasar 1950 dapat disebut tanpa kualifikasi sebagai suatu separatisme<sup>11</sup>. Apakah dalam tahap awal itu "ultimatum" tersebut tidak lebih tepat disebut sebagai regionalisme, bukan separatisme<sup>12</sup>? Label separatisme ini memang dapat diterapkan terhadap Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang dibentuk oleh sayap sipil para pemberontak tanggal 8 Februari 1960, dua tahun setelah ultimatum itu. RPI mempunyai undang-undang dasarnya sendiri, wilayahnya setidak-tidaknya di atas kertas meliputi 10 daerah, yaitu Aceh, Tapanuli, Sumatera Timur, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Maluku

---

10. April 1957-10 Juli 1959). Lihat Bibit Suprpto, 1985, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, PT Ghali Indonesia, Jakarta.

11. Isi ultimatum yang disusun oleh para perwira yang *mbalelo* di Sungai Daerah dan ditujukan kepada Kabinet Ir. Djuanda ini adalah 1) agar kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu lima hari, 2) agar Hatta dan Hamengku Buwono ditunjuk sebagai formatur kabinet baru, 3) agar Hatta dan Hamengku Buwono menerima tugas ini, 4) agar parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengku Buwono untuk membentuk suatu kabinet kerja nasional dengan mandat samapi pemilihan umum berikutnya, dan 5) agar Soekarno melanjutkan posisinya sebagai presiden konstitusional dan memberikan dukungan kepada kabinet kerja nasional yang baru. Sekedar sebagai catatan, "pencalonan" Hatta dan Hamengku Buwono ini dilakukan para pengultimatum tanpa menghubungi mereka terlebih dahulu. Lihat Delliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta, h. 529-539.

12. Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. Eds, 1998, *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Selatan, dan mempunyai presidennya sendiri, yaitu Mr.Syafruddin Prawiranegara.<sup>13</sup>

Namun sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan yang sangat terkemuka dan sebagai proklamator kemerdekaan, Soekarno tidak pernah mau menerima status sebagai "presiden konstitusional" belaka. Dalam berbagai kesempatan memberikan pidato di depan umum, Soekarno menyampaikan pandangan politiknya kepada publik, baik yang sejalan dengan kebijakan resmi pemerintah maupun yang tidak. Pribadi, visi serta kebijakan yang dianut Soekarno ini telah tumbuh sebagai suatu institusi nasional tersendiri, yang berfungsi bersisian dengan bahkan adakalanya mengatasi konstitusi serta otoritas pemerintahan yang secara formal memikul tanggungjawab.

Untuk kedalaman pemahaman kita terhadap keseluruhan dinamika integrasi nasional di Indonesia amatlah perlu kita menelaah dimensi psikohistori dari riwayat hidup para tokoh nasional yang terlibat di dalamnya. Biografi Soekarno yang terbit dalam tahun 1966 seperti dikisahkannya sendiri kepada wartawan Amerika Cindy Adams mengandung bahan yang kaya mengenai informasi tentang persepsi Presiden Soekarno terhadap dirinya, terhadap para pemimpin Indonesia lainnya, terhadap para pemimpin dunia yang ditemuinya, serta terhadap rakyat Indonesia secara menyeluruh.<sup>14</sup> Biografinya itu menunjukkan bahwa Soekarno akan melakukan apapun juga untuk terwujudnya kesatuan dan persatuan nasional yang merupakan obsesinya sebagai pemimpin, termasuk melakukan hal yang amat kontroversial seperti memperjuangkan masuknya unsur-unsur Partai Komunis Indonesia ke dalam jajaran pemerintahan.<sup>15</sup>

---

13. Ajip Rosidi, 1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, sebuah Otobiografi*, Inti Iday Press, Jakarta, h. 215.

14. Adams, Cindy. Terj. Abdul Bar Salim, 1966. *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Pt Gunung Agung, Jakarta.

15. Dalam pidatonya dalam tahun 1957 mengenai masalah ini Soekarno menjelaskan: "Yah saya tahu, Saudara-saudara, misalnya terhadap PKI, ada beberapa Saudara-saudara atau pihak yang berkeberatan dia duduk dalam kabinet. Saya bertanya dengan tenang setenang-tenangnya, Saudara-saudara, apakah kita dapat secara terus-menerus mengabaikan suatu golongan yang di dalam pemilihan umum mempunyai suara enam juta manusia?". Lihat Republik Indonesia, 1957, *Menjelamatkan Republik Proklamasi : Konsepsi Bung Karno*, Kementerian Penerangan RI, Jakarta, h. 13.



Selain pengabaianya terhadap masalah ekonomi, visi Soekarno tentang persatuan bangsa yang mengikutsertakan partai komunis ini adalah merangsang amat banyak kritik dari tokoh-tokoh pemimpin nasional lainnya, baik yang berada dalam kabinet maupun yang berada di luarnya. Perlawanan terhadap kebijakan khususnya ini akhirnya mendorong terjadinya aliansi antara tokoh-tokoh oposisi di tingkat pusat dengan tokoh-tokoh daerah-daerah luar Jawa yang bergolak dan dengan aksi-aksi intelijen pemerintah Amerika Serikat.

Dengan demikian sesungguhnya ada dualisme dalam sistem pemerintahan Indonesia saat itu. Pada suatu sisi, Presiden Soekarno yang secara pribadi bagaikan merupakan "cabang ideologis" dari pemerintahan, yang dari waktu ke waktu menyampaikan pandangannya mengenai masalah-masalah penting kenegaraan, langsung kepada rakyat Indonesia. Pada sisi lain, para perdana menteri merupakan "cabang eksekutif" pemerintahan, yang bertanggungjawab kepada parlemen sebagai cabang legislatif, sesuai dengan sistem demokrasi parlementer. Cabang legislatif ini sendiri terkait dengan partai-partai politik dalam parlemen, yang berperan sebagai partai pemerintah atau sebagai partai oposisi.

Di luar kedua cabang pemerintah ini, secara perlahan kelihatannya timbul suatu fenomena yang sampai sekarang agak sulit untuk ditelaah secara sistematis oleh ilmu politik, yaitu kegiatan politik dari dinas intelijen dan kontra-intelijen, yang dapat kita sebut sebagai "cabang rahasia" dari pemerintahan. Tidak jarang terjadi, aksi cabang rahasia pemerintahan ini hanya diketahui oleh beberapa orang tokoh pada pucuk pimpinan pemerintahan, dan sesuai dengan prinsip *need to know*, dilaksanakan tanpa sepengetahuan pejabat resmi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adakalanya, seperti dalam kasus Kolonel Zulkifli Lubis, dinas intelijen ini selain mengembangkan visi kenegaraannya sendiri juga bergerak sendiri di luar pengetahuan dan kendali pejabat pemerintah manapun juga.

Peranan khas dari Kolonel Zulkifli Lubis, yang lazimnya dipandang sebagai tokoh peletak dasar profesi intelijen di Indonesia, layak mendapatkan ulasan secara khusus. Melalui Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) yang dipimpinnnya, Lubis bukan saja secara pribadi terlibat dalam apa yang disebut sebagai peristiwa 17 Oktober 1952<sup>16</sup>, tetapi juga dalam berbagai kericuhan dalam pengangkatan calon kepala staf angkatan darat antara tahun 1952-1955, disinyalir terlihat dalam upaya

pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam peristiwa Cikini tahun 1957, dan akhirnya memegang peranan penting dalam rapat para tokoh pemberontak di Sungai Dareh, Sumatera Barat, bulan Februari 1958. Tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Lubis merupakan link pin militer yang penting dari berbagai peristiwa intern angkatan darat yang berujung pada pemberontakan PRRI-Permesta.<sup>17</sup>

Adanya dinas rahasia, yang bertugas menangani masalah intelijen dan kontra-intelijen, memang merupakan suatu kebutuhan objektif dalam pelaksanaan tugas negara untuk melindungi bangsa dan negara. Produk yang diharapkan dari mereka adalah informasi yang benar dan tepat waktu mengenai situasi, sehingga pemimpin pemerintahan dapat mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, dinas rahasia terdapat di seluruh negara, baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara yang sudah maju<sup>18</sup>. Dalam dunia nyata dimana masih terdapat potensi ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tidak ada pemerintah yang dapat mengabaikan pentingnya upaya menjaga informasi mengenai hal-hal yang merupakan rahasia negara, untuk mencegah musuh melancarkan serangan secara mendadak, atau mencari informasi tentang rahasia musuh, sehingga ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Seperti juga halnya dengan institusi lainnya, bagaimana caranya dinas rahasia itu berfungsi memang dipengaruhi oleh kepribadian, kebijaksanaan, strategi serta gaya dari tokoh-tokoh pimpinannya.

16. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu upaya pimpinan Angkatan Perang dan pimpinan Angkatan Darat untuk menjaga otonomi pembinaan manajemen militer dari intervensi politisi di parlemen, jelas sama sekali bukan merupakan sebuah upaya kudeta seperti yang lazim kita baca. Namun Lubis memberikan informasi yang berbeda kepada para panglima, yang mengakibatkan beberapa panglima di "daulat" oleh kesatuannya sendiri. Lubis juga menyusupkan agen-agen sendiri ke dalam massa yang dikerahkan Kamal Idris di depan Istana Merdeka, sehingga massa tersebut berperilaku sesuai dengan skenario yang disusunnnya.
17. Selain wawancara singkat dengan sebuah majalah, Lubis tidak banyak meninggalkan penjelasan mengenai peranannya dalam berbagai episode penting dalam sejarah Indonesia modern. Sampai akhir hayatnya ia tetap merupakan tokoh yang misterius.
18. Suatu studi yang cukup komprehensif mengenai kegiatan politik dari dinas intelijen di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, sudah ditulis. Lihat tesis Doktor Richard Tanter, 1991, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989*, Departement of Politics, Faculty of Economic and Politics, Monash University (belum diterbitkan).

Diluar dinas intelijen resmi itu ternyata juga terdapat dinas-dinas rahasia klandestin dari organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya yang ideologinya mengandung ajaran untuk merebut kekuasaan negara, antara lain seperti yang dimiliki oleh partai komunis. Dalam rangka mencapai sasaran strategis partainya untuk merebut kekuasaan pemerintahan melalui jajaran angkatan bersenjata republik Indonesia D.N. Aidit telah membentuk sebuah biro khusus, yang beroperasi secara rahasia diluar jalur resmi dari partai komunis Indonesia (PKI)<sup>19</sup>. Dalam hubungan dengan penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, PKI menugaskan dua orang anggota biro khusus dari Jakarta untuk menyusupi jajaran Komando Operasi " 17 Agustus" yaitu Baharuddin Hanafi, seorang informan SUAD-1 yang di angkat sebagai ketua biro khusus untuk daerah Sumatera Barat, dan Djajusman alias Mamak, seorang pensiunan pembantu Letnan dari Jawa Barat, Yang menjadi wakilnya. Kedua mereka inilah yang sangat aktif memanfaatkan peluang yang terbuka didaerah ini untuk mengembangkan pengaruh PKI dengan bantuan para perwira komando operasi itu yang dapat dipengaruhinya.<sup>20</sup> Biro khusus ini jugalah yang merancang, mengorganisasikan, mengerakkan serta mengendalikan apa yang disebut sebagai gerakan 30 September dalam tahun 1965. Pengaruh PKI di daerah komando operasi 17 Agustus yang kemudian menjadi komando daerah militer III /17 Agustus (Kodam III/17 Agustus) yang meliputi daerah Sumatera Barat dan Riau pasca pemberontakan PRRI dinilai PKI sudah sedemikian kuatnya sehingga D.N. Aidit dengan amat yakin memasukkannya dalam jaringan persiapan kudeta PKI secara nasional, yang dikendalikannya secara langsung.<sup>21</sup>

Beberapa orang perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Kodam III/17 Agustus yang, kemudian terbukti dan yang tersangka terlibat dalam percobaan kudeta dan pemberontakan gerakan 30 September PKI dalam

19. Dua penerbitan terbaru mengenai masalah PKI ini lihat Alex Dinuth, ed, 1997, *Dokumen Terpilih sekitar G 30 S/PKI dan Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*, Intermasa, Jakarta.

20. Lihat berkas perkara tertuduh Suharno Martosujono, eks Letnan Dua Infanteri NRP 132943, reg perkara 01/16/A/1974, Todsada Sumatera Barat, Padang, h. 5.

21. Harold Crouch melaporkan bahwa Biro Khusus PKI ini berhasil mengadakan kontak tetap dengan para perwira di tujuh propinsi, yaitu 250 orang di Jawa Tengah, 200 orang di Jawa Timur, 80-100 orang di Jawa Barat, 40-50 orang di Jakarta, 30-40 orang di Sumatera Utara, 30 orang di Sumatera Barat dan 30 orang di Bali. Lihat Harold Crouch, 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

tahun 1965 di Jakarta, adalah Komandan Kompi "Banteng Raider" Letnan satu Untung, Perwira Intelijen Mayor Latief, dan Panglima Komando Operasi Kolonel Pranoto Reksosamodra<sup>22</sup>

Kecuali jika seluruh dokumen kegiatannya dapat dibuka untuk umum setelah jangka waktu tertentu, adalah mustahil bagi komunitas ilmiah untuk memastikan apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh berbagai dinas rahasia ini dalam suatu peristiwa. Mungkin itulah yang menyebabkan mengapa cukup banyak blank spots dalam analisis terhadap peristiwa sejarah yang mendahului terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta ini. Misalnya, sampai saat ini tidak ada ketegasan siapakah yang melakukan teror dengan melemparkan granat ke kediaman tokoh-tokoh Masyumi yang sangat kritis terhadap Presiden Soekarno, yang menyebabkan mereka merasa perlu untuk meninggalkan ibukota Jakarta menuju daerah Sumatera Barat. Bahwa teror telah ada dalam kehidupan politik Indonesia saat itu diakui secara resmi oleh Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya.<sup>23</sup> Ada dugaan hal itu dilakukan oleh agen-agen intelijen resmi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soekendro, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan aksi teror itu dilakukan oleh agen intelijen lainnya, yang ingin "memancing di air keruh".

Merupakan salah satu faktor penting sebagai katalis dalam melelusnya pemberontakan PRRI-Permesta ini adalah larinya ke daerah Sumatera Barat tokoh-tokoh sipil dan militer yang anti komunis dan karena itu menentang kebijakan Presiden Soekarno. Sikap anti komunisme sebagai salah satu motif terkuat terjadinya gejolak di daerah-daerah luar Jawa juga diakui oleh Panitia 7 yang dibentuk setelah Pemerintah

- 
22. Dengan melanggar Instruksi Penguasa Perang Pusat No.Inst.30/Peparpu/1958 tanggal 14 Juli 1958 yang hanya mengizinkan pembentukan kekuatan Organisasi Keamanan Rakyat (OKR) sebesar satu kompi atau 150 orang di setiap Kodam, di Sumatera Barat Pranoto melatih dan membentuk OKR dengan kekuatan 6.341 orang, yang seluruhnya berasal dari anggota Pemuda Rakyat, organisasi massa PKI. Lihat dokumen Komando Daerah Militer III/17 Agustus, Juli 1977, *Sistem dan Pola Infiltrasi Komunis ke Kodam III/17 Agustus*, Padang h. 7. Besarnya pengaruh PKI di daerah Sumatera Barat ini juga diakui oleh Jenderal A.H. Nasution. Lihat Dr.A.H. Nasution, 1984, jilid 4, *Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba Kedua*, Gunung Agung, Jakarta h. 245.
23. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1958. Lihat Soekarno, Jilid III, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Djakarta h. 321.

Pusat sendiri.<sup>24</sup> Di antara tokoh-tokoh sipil anti komunis ini adalah mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir, mantan Gubernur Bank Indonesia Mr. Syafruddin Prawiranegara yang pernah berjuang di daerah ini antara bulan Desember 1948 sampai bulan Juli 1949 sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Prof. Dr. Soemito Djojohadikusumo.<sup>25</sup> Di antara tokoh penting militer yang anti komunis dapat disebut mantan Deputy KSAD Kolonel Dahlan Djambek putera ulama besar Sumatera Barat Syekh Muhammad Djamil Djambek serta mantan kepala BISAP dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis. Dapat diperkirakan bahwa kehadiran mereka secara pribadi di daerah itu mempunyai pengaruh besar kepada para pejabat sipil dan militer lokal, khususnya terhadap Letnan Kolonel Ahmad Husein.

Dalam hubungan dengan pemberontakan PRRI yang didukung oleh para panglima daerah militer ini adalah mereka untuk menganalisis lebih dalam perkembangan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal mayor Abdul Haris Nasution.<sup>26</sup> Reuni para anggota Divisi Banteng di Sumatera Barat dalam bulan Desember 1956, yang membentuk Dewan Banteng dengan tugas antara lain untuk menangani nasib para demobilisan dan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah mereka, dilaksanakan dengan persetujuan dan dengan bantuannya. Ia memahami dan bersimpati dengan kesulitan hidup prajurit serta mantan prajurit pada saat itu. Komandan Resimen II Letnan Kolonel Ahmad Husein yang memimpin reuni serta mengetuai Dewan Banteng itu bahkan mendapat promosi menjadi Panglima Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST). Sikap simpati terhadap posisi Husein pra-PRRI

---

24. Panitia 7 Pengumpul Bahan, *Lampiran II Risalah-risalah Daerah demi Daerah dan Golongan demi Golongan*, ditandatangani oleh Sekretaris J. Mustika, Major Infanteri 15975, Jakarta, 10 November 1957, 145 halaman, h. 18.

25. Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa menurut Djoeir Moehammad, Prof. Soemito adalah satu-satunya tokoh sipil yang hadir dalam rapat tokoh-tokoh militer di Sungai Daerah yang mendahului diumumkankannya ultimatum kepada Pemerintah Pusat tanggal 10 Februari 1958. Sebagai tokoh PSI dan sebagai utusan pribadi Hatta, Djoeir menasalkan sukarnya ia menghubungi Prof. Soemito selama berada di Sumatera Tengah. Ia memperoleh kesan bahwa Soemito menghindari untuk bertemu. Lihat Djoeir Moehammad, 1997, *Memoar Seorang Sosialis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 268.

26. Nasution diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dalam tahun 1955 setelah diberhentikan dalam tahun 1952 oleh karena terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952 dan dalam tahun 1957 diangkat sebagai Penguasa Perang Pusat berdasar Undang-Undang No. 74 tahun 1957.

ternyata juga pernah ditunjukkan oleh Kolonel Ahmad Jani.<sup>27</sup>

Sebagai KSAD dan Penguasa Perang Pusat, Nasution telah berusaha mencegah meletusnya pemberontakan ini. Pada tanggal 23 Januari 1958 Nasution dengan cepat menghubungi para komandan militer di Tapanuli, Aceh dan Riau, dan berhasil memperoleh kesetiaan atau pernyataan sikap netral mereka. Dalam rangka upaya yang sama Nasution mengunjungi daerah Sulawesi Utara, walau tidak mencapai hasil yang diinginkannya. Anehnya, ia tidak melakukan hal itu untuk daerah Sumatera Barat. Ia bahkan tidak berusaha mendatangi daerah Sumatera Barat ini. Upaya mencegah meletusnya pemberontakan di daerah Sumatera Barat ini justru dilakukan oleh mayor Jenderal Tahi Bonar Simatupang, yang secara pribadi mengadakan kontak dengan mantan Panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon yang bermukim di Padang setelah gagal mengambil alih pemerintahan di daerah Sumatera Utara.<sup>28</sup> Mantan Wakil Presiden Dr. Mohammad Hatta juga mengirim utusan ke Padang untuk mencegah terjadinya pemberontakan tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian terdapat kesan, bahwa walaupun Nasution adalah juga seorang perwira yang anti komunis - dan tujuh tahun kemudian bahkan menjadi sasaran penculikan dari satuan-satuan Gerakan 30 September/PKI-dalam tahun 1958 tersebut kelihatannya Nasution mengabaikan dimensi ideologi dan hanya memusatkan diri pada strategi militer untuk mengisolir daerah Sumatera Barat, untuk kemudian melancarkan operasi gabungan dengan kekuatan besar yang akan menjamin lumpuhnya kekuatan militer pemberontak.

Suatu misteri yang masih perlu diungkap adalah tentang siapa perwira Angkatan Udara yang memerintahkan pemboman sasaran-sasaran

27. Dalam suratnya kepada Presiden Soekarno dan para anggota Panitia 7 tanggal 1 Desember 1957, Yani hanya menyarankan pemecatan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Maludin Simbolon serta Letnan Kolonel H.N.V. Sumual. Ia tidak menyarankan pemecatan terhadap Letnan Kolonel Ahmad Husein. Lihat berkas arsip Panitia 7 yang dibentuk setelah selesainya Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) dalam tahun 1957 untuk menghimpun bahan dari daerah-daerah bergolak, Arsip Nasional, Jakarta.

28. T.B. Simatupang, 1991, *Membuktikan Ketidakebenaran suatu Mitos, Menelusur Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 181-182.

29. Lihat Djoeir Moehammad, 1997, *Memoar Seorang Sosialis*, Yayasan Dbor, Jakarta, h. 273f.

di daerah Sumatera Barat dan di Manado tanggal 21 Februari 1958, yang secara *de facto* telah menghentikan sama sekali upaya penyelesaian secara damai dari masalah daerah-daerah bergolak ini. Pada saat itu, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa tindakan pemerintah terhadap pemberontak terutama akan berbentuk blokade ekonomi, walaupun kemungkinan adanya pertempuran tidak tertutup sama sekali.<sup>30</sup> Daniel s.Lev menduga bahwa pemboman itu dilakukan tanpa sepengetahuan Djuanda. Nasution juga menjelaskan bahwa pemboman itu dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Besar kemungkinan aksi militer tersebut dilancarkan Angkatan Udara setelah Presiden Soekarno mengeluarkan pendapatnya pada hari itu untuk melakukan tindakan yang drastis dengan segala kekuatan yang dimiliki.<sup>31</sup> Dengan demikian, upaya pengungkapan perlu diarahkan kepada oknum-oknum Angkatan Udara yang beraliran radikal, yang mendukung sikap keras PNI dan PKI terhadap PRRI-Permesta.<sup>32</sup>

## 2. Tingkat Daerah

Walau terdapat peranan penting dari tokoh-tokoh sipil dan militer tingkat nasional, namun pemberontakan PRRI-Permesta mustahil dapat terjadi tanpa dukungan dari tokoh sipil dan militer daerah serta masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hubungan dengan masalah integrasi nasional dan intervensi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka Perang Dingin perlu dibahas secara khusus peranan tokoh daerah Sumatera Barat dan daerah Sulawesi Utara.

Terdapat kesan bahwa ada perbedaan posisi antara kedua daerah ini. Sesuai dengan latar belakang daerah Sumatera Barat dalam perjuangan nasional, daerah Sumatera Barat lebih mengemuka dari segi politik,

---

30. Daniel S. Lev, 1966, *Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, New York, h. 40.

31. Kahin, *opcit*, h. 184.

32. Sekedar catatan, walaupun Kepala Staf Angkatan Udara Laksmana Udara Suryadi Suryadarma dikenal sebagai perwira profesional dan non politik, namun isterinya Ny Ulami Suryadarma, saudara dari Utoyo Ramelan, walikota Solo dari unsur PKI, sangat aktif dalam kegiatan PKI mengganggang film-film Amerika Serikat. Keterlibatan oknum-oknum Angkatan Udara tujuh tahun kemudian dalam aksi-aksi G 30 S/PKI di Jakarta merupakan salah satu indikasi lain mengenai kasus ini.

sebagai perlambang perlawanan ideologis terhadap kecenderungan komunistik Presiden Soekarno. Sebaliknya dengan Sulawesi Utara, yang lebih mengemuka dalam perlawanan militer. Sesuai dengan topik makalah ini, penulis lebih menekankan aspek politik pemberontakan ini, dan demikian lebih memfokuskan pada daerah Sumatera Barat. Mengomentari latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI di daerah Sumatera Barat, studi penulis menyimpulkan bahwa proses inversi loyalitas etnik Minangkabau terhadap pemerintah Republik Indonesia tidaklah terjadi tiba-tiba. Pemberontakan tersebut merupakan klimaks dari rangkaian proses panjang kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat.<sup>33</sup>

Sebagai panglima dan sebagai penguasa perang daerah, peranan pencentu pada saat-saat kritis tersebut berada dalam tangan Letnan Kolonel Ahmad Husein. Seperti juga halnya dengan para perwira angkatan darat lainnya yang terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta ini, Husein belum menerbitkan penjelasannya secara utuh mengenai kurun itu. Untuk memperoleh gambaran yang utuh itu, kita harus mengadakan rekonstruksi tindakan serta pernyataannya, yang disampaikan sebelumnya, selama dan setelah pemberontakan itu. Beberapa diantaranya adalah berikut ini.

Husein mempergunakan istilah "ultimatum" dalam tuntutanannya terhadap pemerintah pusat. Namun secara mengherankan ia menerangkan kemudian bahwa ia tidak mempersiapkan kekuatan militer untuk menghadapi physical clash yang pasti akan terjadi dengan Pemerintah Pusat<sup>34</sup>. Ia terlalu mengandalkan jaminan dukungan dari para komandan militer daerah lainnya.<sup>35</sup> Ia juga mengabaikan keberatan dari jajaran Dewan Banteng sendiri, termasuk dari tiga komandan batalyonnya, Mayor Nurmathias, Mayor Djohan, Mayor Iskandar Matrawijaya, serta dari kepala kepolisian Sumatera Tengah, Kaharuddin Datuk

---

33. Tesis S3 penulis berusaha mencari jawaban terhadap latar belakang keterlibatan etnik Minangkabau dalam pemberontakan PRRI dalam tahun 1958, serta upaya rehabilitasi yang dilakukan di daerah itu setelah Orde Baru tahun 1966. Lihat Saafraedin Bahar, 1996, *Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia : Kasus Etnik Minangkabau Di Daerah Sumatera Barat, 1945-1984*, Tesis S3 pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

34. Wawancara Ahmad Husein dengan H.R. Chaniago, 10 Januari 1980, *Arsip Nasional*, Jakarta.

35. Transkrip wawancara Ahmad Husein dengan A.A. Navis, tanpa tanggal



Rangkayo Basa.<sup>36</sup> Sutan Sjahrir bahkan menilai bahwa usul memproklamasikan pemerintahan sendiri di luar pemerintah pusat itu timbul "sekonyong-konyong".<sup>37</sup> Dengan demikian terdapat kesan bahwa ia bukan saja secara militer tidak siap tetapi juga secara politis ia sama sekali tidak siapnya.

Husein mengabaikan sama sekali kemungkinan kerasnya reaksi pemerintah, yang sebelum itu memang berusaha mencarikan penyelesaian secara damai terhadap keluhan daerah-daerah bergolak itu. Tidak mustahil bahwa Husein memang memaksudkan ultimatum itu sekedar sebagai bluff, yang ternyata kemudian meleser. Kelihatannya ia juga terlalu mengandalkan dukungan rakyat Sumatera Barat, dengan tidak menghiraukan kenyataan psikologis bahwa kegigihan rakyat melawan pasukan Brigade UKNIL dalam tahun 1948-1949 tidak dapat begitu saja dialihkan untuk melawan pasukan Angkatan Perang RI.

Dalama upayanya melawan Pemerintah Pusat yang dinilai mengabaikan kepentingan daerah dan mulai condong ke kiri, kelihatannya pimpinan pemberontak telah bertindak terlalu jauh. Walaupun substansi tuntutan daerah-daerah itu diterima oleh Dewan Menteri di bawah Perdana Menteri Djuanda, namun cara penyampaian ultimatum itu telah dirasakan sangat menghina. Dalam penjelasan resmi pemerintah diumumkan bahwa : "Bagi suatu pemerintah yang mempunyai harga diri dan mendapat kepercayaan dari sebagian besar rakyat, sudah tentu tidak mungkin ultimatum tersebut diterima".<sup>38</sup>

Walaupun tidak berpengalaman dalam bidang politik, namun bagaikan seorang politisi, Husein malah jauh lebih mengandalkan dukungan massa rakyat Sumatera Barat dalam rapat-rapat umum.<sup>39</sup> Dalam hal ini ia ternyata juga salah perhitungan. Untuk lebih memahami Husein, besar manfaatnya jika kita selintas menelaah riwayat hidupnya. Husein lahir di Padang tanggal 1 April 1925, sehingga sewaktu pemberontakan itu terjadi ia baru berusia 32 tahun. Pendidikan yang pernah

36. Kahin, *op.cit.* h. 175

37. Sjahrir, 1958, "Peninjauan dan Penilaian Keadaan Dewasa Ini", dalam Sjahrir, 1982, *Sosialisme, Indonesia, Pembangunan*, Leppenas, Jakarta h. 148.

38. Republika Indonesia, 1959, *Dua Tahun Kabinet Karya*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, h. 6.

39. Wawancara dengan Chaniago, *op.cit.*

ditempuhnya adalah MULO Taman Siswa dan Giyugun. Sebagai komandan di Front Padang Area, ia terkenal sebagai "Harimau Kuranji". Namun, walaupun telah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Sumatera Tengah, kelihatannya ia tidak pernah mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD), sehingga kemungkinan sekali visi strategisnya tidak cukup berkembang untuk menjadi salah satu aktor dalam pentas integrasi nasional yang amat kompleks dalam setting Perang Dingin yang tidak kalah kompleknya. Berhadapan dengan keadaan yang amat kompleks itu, tidak jarang Husein kelihatan menjadi ragu-ragu.<sup>40</sup> Tidaklah akan mengherankan bahwa pertimbangan strategisnya akan lebih banyak dipengaruhi oleh para seniorinya, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Maludin Simbolon dan Kolonel Zulkifli Lubis.<sup>41</sup>

Dapat diduga bahwa dengan kekuatan hanya sebesar satu setengah batalion infanteri, dan sama sekali tidak didukung oleh senjata bantuan yang memadai serta sama sekali tidak mempunyai air superiority, secara taktis pasukan PRRI di Sumatera Barat sudah kalah sebelum bertempur menghadapi operasi gabungan terbesar yang pernah dilancarkan Angkatan Perang RI sampai saat itu. Nasution mengakui bahwa "Perlindungan dari udara sangat menentukan. Kalau Sumatera tadinya memiliki perlindungan dari udara kami pasti telah hancur."<sup>42</sup> Kenyataan bahwa para perwira Komando Operasi "17 Agustus" berhasil memobilisasikan kekuatan simpatisan PKI di Sumatera Barat sendiri untuk menghadapi perlawanan gerilya PRRI kemudian, menunjukkan bahwa juga secara strategis keputusan Husein — bersama para perwira pemberontak lainnya untuk mengeluarkan ultimatum itu bersifat *self-defeating*. Perlawanan pasukan pemberontak terhadap pasukan-pasukan Komando Operasi "17 Agustus" dalam taraf awal sedemikian lemahnya, sehingga seorang asing pernah secara sinis menyebutnya sebagai suatu perang saudara yang sangat beradab (*the most civil war*). Aksi penghadangan yang berhasil oleh satu batalyon PRRI di bawah pimpinan Mayor Djohan di Lembah Anai hanya dapat memperlambat kemenangan pasukan peme-

40. Kahin, *op.cit.*, h. 175

41. Kahin, *op.cit.*, h. 176

42. Kahin, *op.cit.*, h. 218

rintah, tetapi tidak dapat menghentikannya. Lebih dari itu, seperti sudah diingatkan Simatupang kepada Simbolon, pengaruh komunisme yang hendak dihambat di daerah itu oleh PRRI justru bertambah besar setelah kekalahan mereka.

Dari segi militer, keadaan amat jauh berbeda di Sulawesi Utara. Lokasi geografis yang jauh dari pulau Jawa dan kenyataan bahwa Pemerintah Pusat harus mengkonsentrasikan kekuatannya terlebih dahulu ke daerah Sumatera Barat dan Riau yang dari segi politis dan ekonomis jauh lebih penting dengan adanya perusahaan minyak Caltex, memungkinkan Permesta untuk membangun kekuatannya, terutama kekuatan udara, yang dalam pertempuran apapun sangat besar pengaruhnya pesawat-pesawat Angkatan Udara PRRI, AUREV, yang diterbangkan oleh penerbang CIA dan Taiwan, memang ternyata mampu melancarkan serangan dan menimbulkan korban baik di pihak angkatan perang RI maupun di pihak rakyat. Namun terbukanya campur tangan Amerika Serikat setelah tertembak jatuhnya pilot Amerika Serikat Allan Pope telah sangat merugikan pemberontak di daerah itu secara politis. Mereka segera dipandang sebagai pengkhianat bangsa, tidak lagi sekedar sebagai pemberontak.

#### Awal dan Akhir Subversi Amerika Serikat

Dalam rangka hangatnya konflik Perang Dingin sejak tahun 1949 antara Blok Barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah kepemimpinan Uni Soviet, dapatlah dipahami bahwa konflik internal yang berkisar masalah komunisme dan posisi PKI di Indonesia sejak tahun 1957 tersebut segera mendapatkan perhatian kedua superpower tersebut. Berbeda dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina yang sudah mempunyai akses kepada aksi PKI di Indonesia sebagai bagian dari gerakan komunisme internasional, keputusan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi di Indonesia dalam rangka Perang Dingin baru dilakukan dalam tahun 1956, sehingga dapat dikatakan agak terlambat.<sup>43</sup> Sejak tahun itu Eisenhower yang secara pri-

---

43. Kahin, *op.cit.*, h. 185

badi tidak menyukai Sockarno yang flamboyan itu bersama Menteri Luar Negeri John Foster Dulles dan kepala Central Intelligence Agency Allen Dulles memutuskan melancarkan subversi ke Indonesia sebagai bagian politik luar negerinya yang anti komunis. Awalnya aksi subversi ini dikendalikan secara langsung dari ibukota Washington dan tidak melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, yang barang tentu menjadi sangat gusar setelah mengetahuinya kemudian.

Seperti dapat terjadi dengan perkiraan pada umumnya, perkiraan-perkiraan CIA tidak seluruhnya tepat, dan kekeliruan perkiraan itu telah menyebabkan kekeliruan pengambilan keputusan oleh pemerintah Amerika Serikat. CIA mengabaikan kenyataan bahwa sikap anti komunisme bukan hanya dianut oleh para pemberontak, tetapi juga oleh jajaran Angkatan Perang RI sendiri. Kelihatannya CIA tidak memperhitungkan bahwa jika kaum pemberontak kalah, yang akan memperoleh kesempatan justru adalah kaum komunis, yang sejak lama memang menganjurkan tindakan kekerasan terhadap PRRI dengan alasan dan kepentingan sendiri. CIA menganggap remeh kekuatan Angkatan Perang RI serta kecepatannya dalam melancarkan serangan ke Pekanbaru untuk mencegah intervensi Armada ke VI Amerika Serikat, yang disiapkan untuk melancarkan intervensi bersenjata dengan dalih menyelamatkan personil Amerika dari perusahaan minyak *Caltex* di daerah itu.<sup>44</sup>

Titik balik subversi Amerika Serikat berskala besar terhadap Republik Indonesia ini terjadi dalam tahun 1958, setelah pasukan pemberontak di daerah Sumatera Barat ternyata melakukan perlawanan yang sangat lemah, walaupun sebagian senjata ringan yang dikirimkan Amerika Serikat sudah diterima mereka. Sebagian perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat ini bersumber dari informasi yang disampaikan oleh Mayor George Benson - asisten atase pertahanan pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan teman seangkatan Kolonel Ahmad Yani sewaktu mengikuti kursus pada *Command and General Staff School* di Fort Leavenworth - kepada Jenderal Maxwell Taylor, Kepala Staf Gabungan Angkatan Perang Amerika Serikat yang berkunjung ke Jakarta. Bersama dengan staf operasinya, Muskita, Kolonel Ahmad Yani - ia merubah ejaan namanya atas anjuran Presiden Sockarno

---

<sup>44</sup>. Kahin, *op.cit*, h. 197

- sebelum itu memang telah mengadakan lobby yang intensif terhadap Benson, bahwa Angkatan Darat adalah juga merupakan kekuatan anti komunis, yang telah berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun dalam tahun 1948, dan bahwa lebih baik jika Amerika Serikat menghentikan bantuannya kepada PRRI itu untuk memelihara hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia.<sup>45</sup> Benson menyetujui pendapat Yani itu. Ia bahkan membantu Yani mempersiapkan rencana operasi gabungan terhadap Sumatera Tengah, dengan memberinya peta-peta topografi yang ada di kedutaannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahinya dengan dua jenis bintang penghargaan sekaligus, yaitu Bintang Yudha Dharma kelas III dan Bintang Kartika Eka Paksi kelas III.<sup>46</sup> Tidak banyak atase pertahanan yang memperoleh bintang penghargaan setinggi itu.

Pada tanggal 20 Mei 1958, jadi kurang lebih sebulan setelah dilancarkan operasi gabungan "17 Agustus" yang berhasil merebut kota Padang dan Bukittinggi yang mempunyai arti politis yang tinggi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles mengadakan sebuah konferensi pers yang memuat pernyataan yang amat berbeda dengan sikapnya sebelumnya. Ia mengharapkan agar masalah PRRI tersebut diselesaikan sebagai masalah rakyat Indonesia sendiri.<sup>47</sup> Perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang disebabkan oleh kemenangan strategis dan taktis pemerintah pusat terhadap pemberontak PRRI di Sumatera Barat telah merupakan babak baru dalam dinamika integrasi nasional di Indonesia. Namun seperti diingatkan Simatupang, hal itu juga membuka suatu lembaran baru, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya yang memberikan kesempatan lebih luas bagi Partai Komunis Indonesia. Masalah komunisme dan Partai Komunis Indonesia ini baru selesai dalam tahun 1966 di bawah kepemimpinan nasional yang baru, Letnan Jenderal TNI Soeharto, yang dalam tahun 1968 dipilih dan diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

---

45. Wawancara dengan penulis

46. Keputusan Presiden No. 039/TK/1972 tanggal 14 Agustus 1972

47. Kahin, *op cit*, h. 237.

### Kesimpulan dan Penutup

Keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya memang dibuat oleh sekelompok kecil pemimpin, yang menduduki dalam posisi-posisi yang menentukan dalam suprastruktur politik. Hal itu dapat mereka secara terbuka maupun secara tertutup. Keputusan yang diambil secara terbuka dapat diawasi dan dikendalikan oleh mekanisme demokrasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun pengambilan keputusan secara tertutup yang ada kalanya memang perlu dilakukan suatu pemerintah selain sukar dikendalikan oleh mekanisme demokrasi juga membuka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberontakan PRRI-Permesta yang dilancarkan oleh para komandan militer daerah yang memimpin berbagai dewan-dewan daerah yang mulanya bertujuan khusus untuk membangun daerahnya masing-masing hanya mungkin terjadi karena kekurangmatangan pertimbangan politik dan militer, serta kepercayaan yang naif terhadap janji bantuan militer Amerika Serikat. Dalam keseluruhan persiapannya amat menonjol pengaruh visi strategi dari dua tokoh intelijen, yaitu Kolonel Zulkifli Lubis dari Indonesia dan Allen Dulles dari Amerika Serikat. Pemberontakan tersebut dapat dipandang sebagai satu kasus keterkaitan antara integrasi nasional dan Perang Dingin di Indonesia.

Besar manfaatnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendasar dan meluas terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia dipergunakan analisis yang bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek militer belaka. Untuk dapat mencakup dimensi psikologi para pembuat keputusan dalam momen-momen yang penting itu, perlu diketahui serta latar belakang mereka serta hubungan sosial mereka dengan aktor-aktor lainnya.